

**ANALISIS PENGARUH PDRB,
PENGANGGURAN, PENDIDIKAN, DAN
KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN
DI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2009**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ANGGIT YOGA PERMANA
NIM. C2B006011**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anggit Yoga Permana

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006011

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PDRB,
PENGANGGURAN, PENDIDIKAN, DAN
KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI
JAWA TENGAH TAHUN 2004-2009**

Dosen Pembimbing : Fitrië Arianti SE, M.Si

Semarang, 1 Agustus 2012

Dosen Pembimbing,

(Fitrië Arianti SE., M.Si)
NIP. 19781116 200312 2003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Anggit Yoga Permana

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006011

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PDRB,
PENGANGGURAN, PENDIDIKAN, DAN
KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI
JAWA TENGAH TAHUN 2004-2009**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Juli 2012

Tim Peguji:

1. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc (.....)
2. Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si (.....)
3. Fitri Arianti, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Anggit Yoga Permana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN, PENDIDIKAN, DAN, KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2009, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Juni 2012
Yang membuat pernyataan,

(Anggit Yoga Permana)
NIM: C2B006011

ABSTRACT

The high level of poverty in Central Java showed the proses of economic development that have not been able to improve the welfare of society equally. Therefore, required the analysis of the factors that influence poverty in an attempt to overcome the poverty problem. The purpose of this study was to analyze the factors affecting poverty in 35 districts/cities in Central Java during the period 2004-2008.

This study uses secondary data analysis tool data panel, consisting of time series data over the period 2004-2009 and cross section 35 districts/cities in Central Java. One of the approaches used to estimate the panel data regression model is to use a fixed effects model, by including dummy variables in the equation, also called Least Square Dummy Variable (LSDV). The dummy variable used in this model because of differences in the characteristics and resource of each region.

Results showed that the GDP growth rate variable, education, health has a negative and significant impact on poverty. Meanwhile, unemployment rate variable has a positive and not significant effect on poverty.

Keywords: Poverty, GDP growth rate, Unemployment, Education, Health, Fixed Effect Model (FEM).

ABSTRAK

Tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan proses pembangunan ekonomi yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, diperlukan adanya analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2004-2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data, yang terdiri dari *data times series* selama periode 2004-2009 dan data *cross section* 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM), yaitu dengan memasukkan variabel dummy dalam persamaan, atau disebut juga dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Dummy wilayah digunakan dalam model ini karena adanya perbedaan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, laju pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, *Fixed Effect Model* (FEM).

KATA PENGANTAR

Penulis haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul, “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004 - 2009”, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Fitri Arianti, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro serta Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan berupa data dan referensi yang bermanfaat.

5. Kedua orang tua, Bapak (Suryahadi) dan Ibu (Esti Haryanti), terima kasih atas perlindungan, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan tiada henti.
6. “Mbah Uti” tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan doanya.
7. Teman-teman Jurusan IESP 2006, kawan-kawan anggota dan kader Gmnl FEB UNDIP, segenap keluarga Teater Buih, dan semua teman-teman yang belum bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas kenangan dan sukacitayang diberikan selama sekian tahun.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 26 Juni 2012

Penulis

Anggit Yoga Permana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINIALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
Bab II Tinjauan Pustaka	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Kemiskinan	18
2.1.2 Ukuran Kemiskinan	22
2.1.3 Penyebab Kemiskinan	23
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	24
2.1.5 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan	27
2.1.6 Pengangguran	28
2.1.7 Hubungan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan	30
2.1.8 Pendidikan	30
2.1.9 Hubungan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan	33

2.1.10 Kesehatan	34
2.1.11 Hubungan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan	36
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	41
2.4 Hipotesis Penelitian	42
Bab III Metode Penelitian	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	44
3.1.1 Variabel Penelitian	44
3.1.2 Definisi Operasional	44
3.2 Jenis dan Sumber Data	45
3.3 Metode Pengumpulan Data	47
3.4 Metode Analisis	48
3.4.1 Estimasi Model Regresi	51
3.4.2 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel	52
3.5 Hausman Test	56
3.6 Uji Asumsi Klasik	56
3.6.1 Deteksi Normalitas	57
3.6.2 Deteksi Multikolinearitas	58
3.6.3 Deteksi Autokorelasi	59
3.6.4 Deteksi Heterokedastisitas	60
3.7 Uji Signifikansi	60
3.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)	61
3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	62
3.7.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	62
Bab IV Hasil dan Pembahasan	65
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	65
4.1.1 Kemiskinan	65
4.1.2 Laju Pertumbuhan PDRB	67
4.1.3 Tingkat Pengangguran	69

4.1.4 Pendidikan	71
4.1.5 Kesehatan.....	73
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	75
4.2.1 Deteksi Normalitas	75
4.2.2 Deteksi Multikolinearitas.....	76
4.2.3 Deteksi Autokorelasi	77
4.2.4 Deteksi Heterokedastisitas.....	78
4.3 Uji Signifikansi.....	80
4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	80
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	82
4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	83
4.4 Interpretasi Hasil.....	88
Bab V Penutup	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Keterbatasan	93
5.3 Saran	93
Daftar Pustaka	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia Tahun 2009.....	7
Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun Periode Tahun 2004-2009.....	9
Tabel 1.3 PDRB Menurut Harga Konstan 2000 Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Periode Tahun 2004-2009.....	10
Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2000 di Pulau Jawa Periode Tahun 2004-2009.....	11
Tabel 1.5 Angka Partisipasi Kasar, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009.....	12
Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran dan Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009.....	13
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.....	66
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009	68
Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009	70
Tabel 4.4 Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Lulus SMA Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009.....	72
Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009	74
Tabel 4.6 R^2 Hasil <i>Auxiliary Regression</i> dalam Model Persamaan	77
Tabel 4.7 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	78

Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	80
Tabel 4.9 Hasil Regresi	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004-2009	6
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan (<i>Vicious Circle Nurkse</i>)	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1 Hasil Uji <i>Jarque-Bera</i>	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data	94
Lampiran B Hasil Regresi Utama.....	99
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Klasik	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Ukuran ini menitikberatkan perhatiannya pada kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto). Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat (Sadono Sukirno, 2005).

Pembangunan ekonomi pada masa ekonomi tradisional hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan PDB, baik secara keseluruhan maupun per kapita. Peningkatan PDB ini selanjutnya diharapkan akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan *trickle down effect* (Todaro, 2000). Namun demikian, pandangan yang berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi dalam membangun perekonomian suatu negara mulai menuai banyak kritik dan mendapatkan masukan, sehingga memicu munculnya pandangan-pandangan baru dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan PDB tidak lagi menjadi satu-satunya prioritas penting dalam

membangun perekonomian suatu negara, karena sampai saat ini belum mampu menjawab dalam usaha-usaha pengentasan kemiskinan.

Menurut Todaro (2000), bahwa pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah yang harus diatasi dalam konteks pembangunan ekonomi sesuai pandangan ekonomi baru. Keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan PDB, melainkan juga kemampuan suatu negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 1997). Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Apabila dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, meliputi (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (2) *cyclical poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) *accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari

suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sastraamadja, 2003).

Dalam menerjemahkan paradigma baru ekonomi, ada beberapa isu sentral yang menjadi fokus perhatian bagi upaya penanggulangan kemiskinan (Beni, 2001), yaitu sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat *local specific*. Maksudnya bahwa penanggulangan kemiskinan harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi daerah tersebut.
2. Upaya pengentasan kemiskinan dalam era otonomi daerah harus diikuti dengan perbaikan faktor-faktor produksi, antara lain: (a) melalui penetapan kebijakan *land reform* melalui peraturan daerah; (b) terbentuknya lembaga keuangan mikro untuk membiayai usaha rakyat.
3. Program penanggulan kemiskinan harus merupakan program pembangunan yang produktif dan memberi sumbangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di tingkat akar rumput secara berkelanjutan dan dengan pendampingan yang intensif.
4. Dalam suasana demokratisasi dan desentralisasi, upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan tidak lepas dari berbagai hal yang terkait, yaitu (a) terselenggaranya praktik pemerintahan yang baik (*good governance*); (b) pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah; (c) kerja sama (*partnership*) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam penanggulangan kemiskinan; dan

(d) upaya pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan setempat.

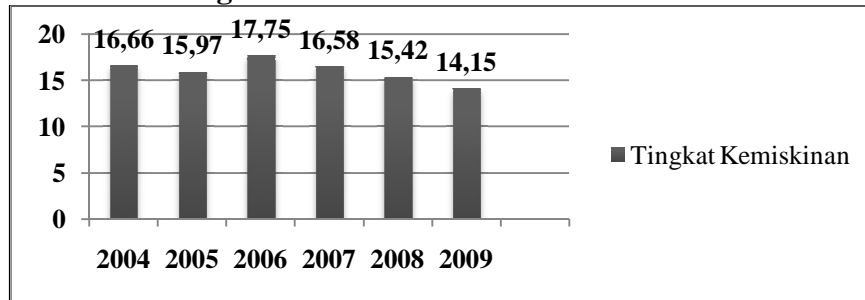
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2009). Menurut Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005), menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang mempunyai lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*proper*); (2) ketidakberdayaan (*powerless*); (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*); (4) ketergantungan (*dependence*); dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Dihadapkan pada sosiologis masyarakat yang majemuk, kemiskinan menjadi tantangan besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu di dalam UUD 1945, sehingga pengentasan kemiskinan tersebut juga merupakan amanat yang ditujukan kepada segenap bangsa Indonesia.

Saat ini, Indonesia telah menerapkan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui sistem yang desentralistik, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam

mengelola potensi daerah masing-masing secara maksimal guna untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ketika dihadapkan pada kemajemukan tipologi masyarakat dan keberagaman kekayaan hayati di setiap daerah, sistem yang desentralistik memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masing-masing pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan yang relevan, sehingga sumber-sumber ekonomi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula pada kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan, sistem pemerintahan yang desentralistik seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin semakin cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Masyarakat digolongkan ke dalam penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Selanjutnya, melalui pendekatan ini dapat digunakan untuk menghitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk (*head count index*).

Gambar 1.1
Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004-2010



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2010, diolah.

Secara garis besar, tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2004 hingga tahun 2009 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti terlihat pada Gambar 1.1. Pada tahun 2004 tingkat kemiskinan sebesar 16,66 persen turun hingga menjadi 14,15 persen pada tahun 2009. Hanya terjadi peningkatan di tahun 2006 menjadi 17,75 persen, hal ini terjadi karena pada tanggal 1 September 2005 terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang kebutuhan lainnya. Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut cukup tinggi, akibatnya terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Penambahan jumlah tersebut berasal dari penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan, lalu bergeser posisinya menjadi miskin akibat kenaikan harga BBM dan barang-barang kebutuhan pokok tersebut. Namun, kembali terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dari tahun 2006 hingga 2010, yaitu dari 17,75 persen di tahun 2006 menjadi 14,15 persen di tahun 2009.

Pada gilirannya, usaha pengentasan kemiskinan ini akan mengarah pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Selama ini kecenderungan pembangunan ekonomi Indonesia yang terpusat di Pulau Jawa, ternyata justru

muncul masalah kemiskinan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia
Tahun 2009 (Jiwa)

Propinsi	Perkotaan (K)	Pedesaan (D)	K+D
Nanggroe Aceh	182.200	710.700	892.900
Sumatera Utara	688.000	811.600	1.499.700
Sumatera Barat	115.800	313.500	429.300
Riau	225.600	301.900	527.500
Jambi	117.300	132.400	249.700
Sumatera Selatan	470.000	697.800	1.167.900
Bengkulu	117.600	206.500	324.100
Lampung	349.300	1.209.000	1.558.300
Bangka Belitung	28.800	47.800	76.600
Kepulauan Riau	62.600	65.600	128.200
DKI Jakarta	323.200	-	323.200
Jawa Barat	2.531.400	2.452.200	4.983.600
Jawa Tengah	2.420.900	3.304.800	5.725.700
DI Yogyakarta	311.500	274.300	585.800
Jawa Timur	2.148.500	3.874.100	6.022.600
Banten	348.700	439.300	788.100
Bali	92.100	89.700	181.700
Nusa Tenggara Barat	557.500	493.400	1.050.900
Nusa Tenggara Timur	109.400	903.700	1.013.100
Kalimantan Barat	94.000	340.800	434.800
Kalimantan Tengah	35.800	130.100	165.900
Kalimantan Selatan	68.800	107.200	176.000
Kalimantan Timur	77.100	162.200	239.200
Sulawesi Utara	79.300	140.300	219.600
Sulawesi Tengah	54.700	435.200	489.800
Sulawesi Selatan	124.500	839.100	963.600
Sulawesi Tenggara	26.200	408.200	434.300
Gorontalo	22.200	202.400	224.600
Sulawesi Barat	43.500	114.700	158.200
Maluku	38.800	341.200	380.000
Maluku Utara	8.700	89.300	98.000
Papua Barat	8.600	248.300	256.800
Papua	28.200	732.200	760.300
Indonesia	11.910.500	20.619.400	32.530.000

Sumber: BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan, 2010

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2009 mencapai 56,65 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, dengan proporsi penduduk miskin kota 2.148.500 jiwa dan penduduk desa sebesar 3.874.100 jiwa, sehingga total penduduk miskin Jawa Timur sebesar 6.022.600 jiwa. Lalu berikutnya adalah Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 5.725.700 jiwa, dengan proporsi penduduk kota sebesar 2.420.900 jiwa dan penduduk desa sebesar 3.304.800 jiwa.

Adapun “*Grand Strategy*” dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. *Pertama*, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. *Ketiga*, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. *Keempat*, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. *Kelima*, kemitraan regional, dilakukan untuk

pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi di atas (Bappeda Jateng, 2007). Dalam hal ini, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Indonesia dan mempunyai tingkat kemiskinan paling tinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.2
Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa
Periode Tahun 2004-2009 (Persen)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
DKI Jakarta	3,18	3,61	4,57	4,61	4,29	3,62	3,94
Jawa Barat	12,10	13,06	14,49	13,55	13,01	11,96	13,00
Jawa Tengah	21,11	20,49	22,19	20,43	19,23	17,72	20,14
DI Yogyakarta	19,14	18,95	19,15	18,99	18,32	17,23	18,62
Jawa Timur	20,08	19,95	21,09	19,98	18,51	16,68	19,33
Banten	8,58	8,86	9,79	9,07	8,15	7,64	8,65

Sumber : PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2010, diolah.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan rata-rata paling tinggi, yaitu sebesar 20,14 persen. Disusul berikutnya oleh Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu masing-masing sebesar 19,33 persen dan 18,62 persen. Meskipun mempunyai kecenderungan menurun jika dilihat dari tahun 2004 sebesar 21,11 persen dan menurun hingga 17,72 persen pada tahun 2009, tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih relatif tinggi yaitu angka di atas *hard core* atau di atas 10 persen. Selanjutnya, DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3,94 persen.

Untuk mengetahui kondisi perekonomian makro Jawa Tengah di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, berikut adalah rincian PDRB menurut harga

konstan 2000 provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2004-2009 (pada Tabel 1.3).

Tabel 1.3
PDRB Menurut Harga Konstan 2000 Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa
Periode Tahun 2004-2009 (Juta Rupiah)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DKI Jakarta	278.524.822,00	295.270.547,00	312.826.712,76	332.971.254,83	353.723.390,53	371.469.499,10
Jawa Barat	230.003.495,86	242.883.881,74	257.499.445,75	274.180.307,83	291.205.836,70	303.405.250,51
Jawa Tengah	135.789.872,31	143.051.213,88	150.682.654,74	159.110.253,76	168.034.483,29	176.673.456,57
DI.Yogyakarta	16.146.423,77	16.910.876,87	17.535.749,31	18.291.511,71	19.212.481,03	20.064.256,65
Jawa Timur	242.228.892,17	256.442.606,28	271.249.317,01	287.814.183,91	305.538.686,62	320.861.168,91
Banten	54.880.406,50	58.106.948,22	61.341.658,64	65.046.775,77	79.699.684,03	83.440.214,37
Jawa	957.573.912,62	1.012.666.073,99	1.071.135.538,21	1.137.414.287,81	1.217.414.562,20	1.275.913.846,11
Indonesia	1.604.036.087,33	1.690.311.332,78	1.777.950.134,32	1.878.724.927,24	1.999.543.991,22	2.094.316.286,50

Sumber : BPS, PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2010, diolah.

Dari indikator makro, PDRB Jawa Tengah terus mengalami kenaikan dari 135.789.872,31 juta rupiah pada tahun 2004, meningkat hingga 176.673.456,57 juta rupiah pada tahun 2009. Jumlah PDRB Jawa Tengah masih berada di bawah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Posisi tertinggi ditempati DKI Jakarta, pada tahun 2009 mencapai 371.469.499,10 juta rupiah. Selanjutnya Jawa Timur dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 320.861.168,91 juta rupiah dan 303.405.250,51 juta rupiah pada tahun 2009.

Dari peningkatan PDRB masing-masing provinsi di Pulau Jawa yang telah ditunjukkan pada Tabel 1.3, maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2000 Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Periode Tahun 2004-2009 (pada Tabel 1.4).

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2000 di Pulau Jawa
Periode Tahun 2004-2009 (Persen)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-Rata
DKI Jakarta	5,65	6,01	5,95	6,44	6,23	5,02	5,86
Jawa Barat	4,77	5,60	6,02	6,48	5,21	4,19	5,32
Jawa Tengah	5,13	5,35	5,33	5,59	5,61	5,14	5,35
DIY	5,12	4,73	3,70	4,31	5,03	4,43	4,53
Jawa Timur	5,83	5,87	5,77	6,11	6,16	5,01	5,78
Banten	5,63	5,88	5,57	6,04	22,53	4,69	7,00
Jawa	5,36	5,57	5,39	5,83	8,46	4,81	5,80
Indonesia	5,03	5,37	5,18	5,67	6,43	4,74	5,38

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun, diolah.

Dari sekian juta rupiah peningkatan PDRB Jawa Tengah, hanya memberikan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,35 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa provinsi Jawa Tengah hanya berada di atas Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Barat. Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 4,53 persen dan 5,32 persen. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi adalah DKI Jakarta, yakni sebesar 5,86 persen.

Kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki. Berbeda halnya dengan pembangunan manusia, konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (*enlarging choice*) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli (IPM, 2007).

Berikut ini adalah rincian mengenai tingkat angka partisipasi kasar, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.

Tabel 1.5
Angka Partisipasi Kasar (Persen), Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), Angka Melek Huruf (Persen) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009

Tahun	Angka Partisipasi Kasar			Rata-rata Lama Sekolah	Angka Melek Huruf
	SD	SMP	SMA		
2004	108,14	85,21	52,69	6,5	86,7
2005	107,01	85,08	55,20	6,6	87,4
2006	111,00	82,11	54,54	6,8	88,2
2007	114,08	87,64	56,91	6,8	88,6
2008	111,58	88,07	58,72	6,9	89,2
2009	112,02	80,42	60,85	7,1	89,5

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun, diolah.

Dari Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa indikator pendidikan mengalami peningkatan, yaitu pada angka partisipasi kasar (SD, SMP, dan SMA), rata-rata lama sekolah, angka melek huruf. Pada angka partisipasi kasar, peningkatan terbesar terjadi di angka partisipasi kasar tingkat SMA, yaitu meningkat sebesar 8,16 persen dari 52,69 persen pada tahun 2005 menjadi 60,85 persen pada tahun 2009. Selanjutnya, rata-rata lama sekolah dari tahun 2004 hingga 2009 meningkat sebesar 0,6 tahun, yaitu dari 6,5 tahun menjadi 7,1 tahun. Peningkatan juga terjadi pada angka melek huruf pada periode tahun 2004-2009, yaitu sebesar 2,8 persen. Angka melek huruf tahun 2004 sebesar 86,7 persen meningkat menjadi 89,5 persen pada tahun 2009.

Berikut ini adalah rincian mengenai tingkat pengangguran dan angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.

Tabel 1.6
Tingkat Pengangguran (Persen) dan Angka Harapan Hidup (Tahun) di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009

Tahun	Tingkat Pengangguran	Angka Harapan Hidup
2004	6,54	69,7
2005	5,88	70,6
2006	7,29	70,8
2007	7,70	70,9
2008	7,35	71,1
2009	7,07	71,3

Sumber : BPS, 2004-2009, diolah.

Dari Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran dan angka harapan hidup dari tahun 2005 hingga 2009 cenderung mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran dari tahun 2005 hingga tahun 2009 cenderung meningkat, yaitu sebesar 6,54 pada tahun 2005 persen menjadi 7,07 persen pada tahun 2009. Peningkatan terbesar yaitu pada tahun 2006 sebesar 1,41 persen dari 5,88 persen pada tahun 2005 menjadi 7,29 pada tahun 2006, dan kembali meningkat pada tahun 2007 dengan peningkatan sebesar 0,41 persen dari 7,29 persen pada tahun 2006 menjadi 7,70 persen pada tahun 2007. Hal tersebut sangat dimungkinkan adanya pengaruh kenaikan harga BBM yang sangat mempengaruhi sektor makro maupun mikro ekonomi di dalam masyarakat, salah satunya terjadi lonjakan tingkat pengangguran. Namun demikian, tingkat pengangguran dari tahun 2007 hingga 2009 terus mengalami penurunan, yaitu menurun dari 7,70 persen pada tahun 2007 menjadi 7,07 persen pada tahun 2009. Selanjutnya, angka harapan hidup juga meningkat dari 69,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 71,3 tahun pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada indikator kesehatan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004 hingga 2009.

1.2 Rumusan Masalah

Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2004-2009 sebesar 20,14 persen. Tingkat pengangguran yang tinggi juga mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu memiliki kecenderungan meningkat dari 6,54 persen pada tahun 2004 menjadi 7,07 persen pada tahun 2009. Sementara itu, kinerja ekonomi mengalami perbaikan setiap tahunnya, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan 2000 sebesar 5,35 persen. Perbaikan juga terjadi pada indikator pembangunan manusia, yaitu pada pendidikan dan kesehatan. Indikator pendidikan secara umum meningkat, yang ditunjukkan oleh angka partisipasi kasar, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf. Namun demikian, angka partisipasi kasar sekolah tingkat SD masih lebih tinggi dibandingkan untuk tingkat SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Dalam penelitian ini, tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menjadi masalah yang akan diteliti, dimana diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tersebut meliputi laju pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, pendidikan, dan kesehatan di Jawa Tengah.

Dari uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Mengetahui pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi di dalam memahami pengaruh laju pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, pendidikan

dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Diuraikan secara empiris mengungkap faktor-faktor dan variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi kemiskinan, dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pengambil kebijakan yang terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan mencoba menarik suatu Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan Keterbatasan dari penelitian dan Saran-Saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Adapun berbagai pendapat yang mengemukakan tentang kemiskinan.

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang

lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (Wikipedia.com, 2012).

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun demikian, kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat dari peluang memperoleh kesehatan dan umur panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam hidup. Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (*enlarging choice*) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (IPM, 2007).

Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk

referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2) Kemiskinan relatif

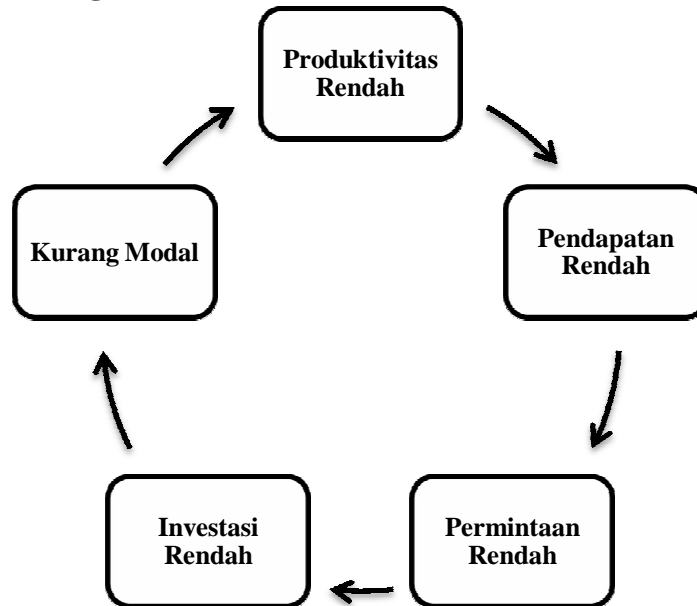
Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Menurut Sastraamadja (2003), kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat berdasarkan pola waktu, meliputi (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (2) *cyclical poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) *accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Jhingan (1992) mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. *Pertama*, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. *Kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. *Ketiga*, penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Gambar 2.1
Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle Nurkse*)



Sumber : Jhingan,1992.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.1.3 Penyebab Kemiskinan

World Bank mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.

Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

- 1) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- 3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.

- 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan

yang lain saling memerlukan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Rincian penjelasannya sebagai berikut :

1) Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa.

2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.

- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor *netto*.

3) Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

a) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto

yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2.1.5 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Kuznet (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian Hermanto S. dan Dwi W. (2007) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Wongdesmiwati (2009) menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia.

2.1.6 Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno, 2004). Jenis-jenis pengangguran:

1) Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

a) Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak 5 persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah. Para penganggur ini bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

b) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

c) Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

2) Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b) Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c) Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d) Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu termasuk dalam golongan setengah menganggur.

2.1.7 Hubungan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.1.8 Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:

- 1) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan formal:
 - a) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - c) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, *magister*, spesialis, dan *doctor* yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- 2) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

- 3) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004).

Pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian. (Becker, 1964; Schultz, 1981 dalam Dian Satria, 2008). Logika ini juga yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (*human capital*). Romer (1986) dan Lucas (1988) dalam Dian Satria (2008) menjelaskan bahwa modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan *human freedom* secara umum. Selain itu, fokus perkembangan global saat ini yang dicatat dalam *millennium development goals* juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas yang utama.

2.1.9 Hubungan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.10 Kesehatan

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Mils dan Gilson (1990) dalam Dimas (2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
- b) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- c) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
- d) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
- e) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Juanita (2002) menyatakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Di dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.

Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan

kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangun kesehatan di daerah tersebut.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. AHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

2.1.11 Hubungan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Selanjutnya, Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah

perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005), dalam jurnal “Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Petumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model *Computable General Equilibrium*.” Menggunakan metode *Computable General Equilibrium* (CGE), dan *Foster-Greer-Thorbecke method*. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan, dan investasi kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah investasi sumberdaya manusia berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi kesehatan dan investasi pendidikan sama-sama dapat mengurangi kemiskinan, namun investasi kesehatan memiliki persentase yang lebih besar.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dalam jurnal “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”, menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Data yang digunakan adalah data dari 26 provinsi tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Model yang digunakan $POVERTY_{ij} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{ij} + \beta_2 POPULASI_{ij} + \beta_3 AGRISHARE_{ij} + \beta_4 INDUSTRISHARE_{ij} + \beta_5 INFLASI_{ij} + \beta_6 SMP_{ij} + \beta_7 SMA_{ij} + \beta_8 DIPLOMA_{ij} + \beta_9 DUMMYKRISIS_{ij} + \varepsilon_{ij}$. Dimana POVERTY adalah jumlah penduduk miskin,

PDRB adalah pertumbuhan ekonomi, POPULASI adalah jumlah penduduk, AGRISHARE adalah pangsa sektor pertanian, INDUSTRISHARE adalah pangsa sektor industri, INFLASI adalah tingkat inflasi tahunan, SMP adalah jumlah lulusan sekolah SMP, SMA adalah jumlah lulusan SMA, DIPLOMA adalah jumlah lulusan sekolah setingkat diploma, dan DUMMYKRISIS adalah *dummy* krisis ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang relatif kecil. Variabel inflasi dan populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan.

Pradeep Agrawal (2008), dalam jurnal "*Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhtan*". Penelitian ini menggunakan metode panel data untuk setiap provinsi di Kazakhtan selama periode 2000-2002 dengan *fixed effect model* (FEM). Variabel yang digunakan adalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran, tingkat upah dengan model : $poverty = growth + equality + unemployment + wages$. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan kemiskinan, sedangkan ketimpangan memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat upah riil, akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Wongdesmiwati (2009) dalam jurnal “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika”, menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 1990 hingga tahun 2004. Model yang digunakan adalah $\text{Log}Y_i = \beta_0 + \beta_1\text{Log}X_{1i} + \beta_2\text{Log}X_{2i} + \beta_3\text{Log}X_{3i} + \beta_4\text{Log}X_{4i} + \beta_5\text{Log}X_{5i} + \beta_6\text{Log}X_{6i} + \varepsilon_i$. Dimana Y_i adalah jumlah penduduk miskin, X_{1i} adalah jumlah penduduk Indonesia per tahun, X_{2i} adalah PDB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi, X_{3i} adalah angka harapan hidup, X_{4i} adalah persentase angka melek huruf, X_{5i} adalah persentase penggunaan listrik, X_{6i} adalah persentase konsumsi makanan, β_0 adalah intersep, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ merupakan penduga (koefisien regresi) model persamaan, dan ε_i adalah besaran yang membuat nilai Y menyimpang dari garis regresinya. Hasil dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, dan konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan	Model Regresi	Metode Analisis	Hasil Empiris
1	Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005)	Mengetahui pengaruh investasi kesehatan dan investasi pendidikan terhadap upaya mengurangi kemiskinan.		<i>Computable General Equilibrium (CGE), dan Foster-Greer-Thorbecke method</i>	Investasi sumberdaya manusia berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi kesehatan dan investasi pendidikan sama-sama dapat mengurangi kemiskinan, namun investasi

					kesehatan memiliki persentase yang lebih besar.
2	Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)	Menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.	$POVERTY_{ij} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{ij} + \beta_2 POPULASI_{ij} + \beta_3 AGRISHAR_{ij} + \beta_4 INDUSTRI_{ij} + \beta_5 INFLASI_{ij} + \beta_6 SMP_{ij} + \beta_7 SMA_{ij} + \beta_8 DIPLOMA_{ij} + \beta_9 DUMMY_{ij} + \epsilon_{ij}$	Panel data	Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang relatif kecil. Variabel inflasi dan populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan.
3	Pradeep Agrawal (2008)	Mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan	$poverty = growth + equality + unemployment + wages$	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan kemiskinan, sedangkan ketimpangan memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat upah riil, akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.
4	Wongdesmiwati (2010)	Mengetahui faktor-faktor yang	$\log Y_i = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1i} + \beta_2 \log X_{2i} +$	<i>Multiple regression</i>	Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan

		mempengaruhi jumlah penduduk miskin	$\beta_3 \text{Log}X_{3i} + \beta_4 \text{Log}X_{4i} + \beta_5 \text{Log}X_{5i} + \beta_6 \text{Log}X_{6i} + \epsilon_i$		terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, dan konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin.
--	--	-------------------------------------	--	--	--

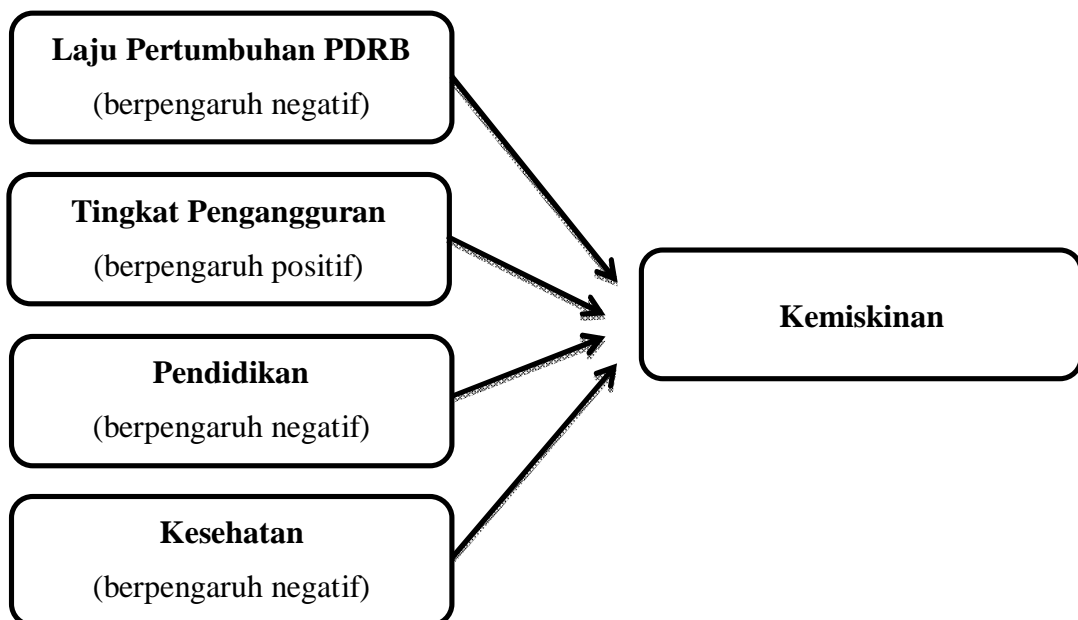
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh empat variabel pembangunan ekonomi, antara lain laju pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, pendidikan dan kesehatan. PDRB sebagai indikator pertumbuhan di Jawa Tengah. Tingkat pengangguran untuk menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dimana akan sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dan kesehatan untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Keempat variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan kemiskinan sebagai variabel dependen akan diregres untuk mendapatkan tingkat signifikansinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel

independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Jawa Tengah untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara skema, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Diduga laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

- 2) Diduga tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
- 3) Diduga pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
- 4) Diduga kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Tingkat kemiskinan (P) Jawa Tengah sebagai variabel dependen, selanjutnya variabel independen dalam penelitian ini meliputi laju pertumbuhan PDRB (Y), tingkat pengangguran (U), pendidikan (E), kesehatan (H), dan *dummy* (D) wilayah yang mewakili 34 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.1.2 Definisi Operasional

Perlu adanya definisi operasional untuk memperjelas dan memudahkan dalam memahami penggunaan variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Definisi operasional tersebut sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan (P) adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009 (dalam satuan persen). Data diambil dari BPS.
2. Laju Pertumbuhan PDRB (Y), dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga konstan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Y_{it} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana:

Y_{it} = Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota i tahun t

$PDRB_t$ = PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota i tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota i tahun t-1

3. Tingkat pengangguran terbuka (U) adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009 (dalam satuan persen). Data diambil dari BPS.
4. Pendidikan (E) dinyatakan sebagai penduduk berumur 10 tahun keatas yang lulus pendidikan terakhir SMA ke atas di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009 (dalam satuan jiwa). Data diambil dari BPS.
5. Kesehatan (H) diwakili oleh angka harapan hidup, yaitu umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jateng tahun 2004-2009 (dalam satuan tahun). Data diambil dari BPS.
6. *Dummy* (D) dinyatakan sebagai *dummy* wilayah yang mewakili 34 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009. Data diambil dari BPS.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, berupa data-data yang menunjang dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh dari Jawa Tengah Dalam Angka terbitan BPS. Adapun data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) dari tahun 2004-2009 dan data deret lintang (*cross section*) sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga dihasilkan jumlah observasi (N) sebanyak 210.

Penelitian ini menggunakan data panel (*pooling data*) atau data longituginal. Data panel (*cross sectional time series*) adalah sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu. *Cross section* untuk melihat perbedaan antar kabupaten/kota, dan *time series* untuk merefleksikan perubahan pada kurun waktu enam tahun selama periode tahun 2004-2009.

Menurut Gujarati (2003) keuntungan menggunakan data panel yaitu:

1. Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data *cross section* dalam rentang waktu tertentu, maka data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut.
2. Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih baik, tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
3. Penggunaan data panel mampu meminimalisasi bias yang dihasilkan jika kita meregresikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Dalam data panel, hilangnya suatu variabel akan tetap menggambarkan perubahan lainnya akibat penggunaan data *time series*. Selain itu, penggunaan

data yang tidak lengkap tidak akan mengurangi ketajaman estimasi. Dengan model data panel juga dapat mengeluarkan variabel yang sulit diobservasi, yang disebut sebagai *individual effect*. *Individual effect* tersebut dikategorikan dua macam, yaitu *fixed effect* dan *random effect*. Secara hipotesis bahwa jika sumber data berasal dari sample maka dugaan model panel adalah *random effect*, namun bila sumber data adalah data *aggregate* maka kecenderungan adalah *fixed effect*. Namun demikian, dengan *Hausman Test* kita dapat memutuskan adalah model data panel tersebut *random effect* atau *fixed effect*.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tahunan dari Badan Pusat Statistik dan Bappeda Jateng.

3.4 Metode Analisis

Studi ini menggunakan analisis panel data (*pooling data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 7. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana N adalah banyaknya data *cross section*.

Sedangkan persamaan model dengan *time series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana T adalah banyaknya data *time series*.

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana :

Y = variabel dependen

X = variabel independen

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N × T = banyaknya data panel

Menurut Hsiao (2003) dan Baltagi (2005), keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a) Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.
- b) Dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), dan lebih efisien.
- c) Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari *cross section*.

- d) Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data times series atau *cross section*.
- e) Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.
- f) Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Dalam analisis model data panel dikenal, dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendekatan efek tetap (*Fixed effect*)

Kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil biasa tersebut adalah asumsi *intersept* dan *slope* dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun antar waktu yang mungkin tidak beralasan. Generalisasi secara umum yang sering dilakukan adalah memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit *cross section* maupun *time series*. Pendekatan efek tetap akan menyoroti nilai intersep yang mungkin saja bisa berbeda-beda antar unit *cross section*. Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka dikenal dengan model efek tetap (*fixed effect*) atau disebut juga dengan *Covariance Model*. Bentuk persamaan model efek tetap sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + x_{it}^j \beta_j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

dimana:

Y_{it} = variabel terikat di waktu t untuk unit *cross section* i

α_i = intercept yang berubah-ubah antar *cross section* unit

x_{it}^j = variabel bebas j di waktu t untuk unit *cross section* i

β_j = parameter untuk variabel ke j

ε_{it} = komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i

Model efek tetap ini menambahkan sebanyak $(N-1)$ variabel *dummy* (D_i) ke dalam model dan menghilangkan satu sisanya untuk menghindari kolinearitas sempurna antar variabel penjelas. Dalam pendekatan efek tetap, akan terjadi *degree of freedom*. Keputusan memasukkan variabel boneka ini harus didasarkan pada pertimbangan statistik karena dengan melakukan penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya *degree of freedom* yang pada akhirnya akan mempengaruhi keefisienan dari parameter yang diestimasi.

2) Pendekatan efek acak (*Random effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang di dalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen *error* (*error component model*) atau disebut juga model efek acak

(*random effect*). Bentuk model efek acak ini dijelaskan pada persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha_i + x_{it}^j \beta_j + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

$$\varepsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it} \dots\dots\dots (3.6)$$

di mana :

$u_i - N(0, \delta_u^2)$ = komponen *cross section error*

$v_t - N(0, \delta_v^2)$ = komponen *time series error*

$w_i - N(0, \delta_w^2)$ = komponen *error* kombinasi

Asumsinya adalah *error* secara individu juga tidak saling berkorelasi begitu juga dengan *error* kombinasinya. Dengan menggunakan model efek acak, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap ataupun efek acak ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan nilai *Chi Square Statistics* sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik.

3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Panel Data

Penelitian mengenai pengaruh laju pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah, menggunakan data *time series* selama 6 tahun

terakhir yang diwakili data tahunan dari 2004-2009 dan data *cross section* sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kombinasi atau *pooling* menghasilkan 210 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$P_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 E_{it} + \alpha_4 H_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.7)$$

dimana :

P = tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah

Y = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah

U = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah

E = angka partisipasi kasar SMA kabupaten/kota di Jawa Tengah

H = angka harapan hidup kabupaten/kota di Jawa Tengah

α_0 = intersep

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien regresi variabel bebas

μ_{it} = komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i

i = 1, 2, 3, ..., 35 (data *cross section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)

t = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (data *time series*, tahun 2004-2009)

3.4.2 Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Penggunaan Variabel

Dummy

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan *error* term, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu :

- a) Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*), dan *error term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b) Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.
- c) Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.
- d) Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- e) Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009 digunakan asumsi FEM yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika variabel *dummy* digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Penelitian ini menggunakan *dummy* wilayah, untuk melihat perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 6 tahun periode penelitian (tahun 2004-2009) dimana Kota Semarang sebagai wilayah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Kota Semarang sebagai *benchmark* adalah Kota Semarang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi

Jawa Tengah. Setelah memasukkan variabel *dummy* wilayah pada persamaan 3.7 maka model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 P_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 E_{it} + \alpha_4 H_{it} + \gamma_1 D_1 + \gamma_2 D_2 + \gamma_3 D_3 + \gamma_4 D_4 + \gamma_5 D_5 \\
 & + \gamma_6 D_6 + \gamma_7 D_7 + \gamma_8 D_8 + \gamma_9 D_9 + \gamma_{10} D_{10} + \gamma_{11} D_{11} + \gamma_{12} D_{12} + \gamma_{13} D_{13} + \\
 & \gamma_{14} D_{14} + \gamma_{15} D_{15} + \gamma_{16} D_{16} + \gamma_{17} D_{17} + \gamma_{18} D_{18} + \gamma_{19} D_{19} + \gamma_{20} D_{20} + \gamma_{21} D_{21} + \\
 & \gamma_{22} D_{22} + \gamma_{23} D_{23} + \gamma_{24} D_{24} + \gamma_{25} D_{25} + \gamma_{26} D_{26} + \gamma_{27} D_{27} + \gamma_{28} D_{28} + \gamma_{29} D_{29} + \\
 & \gamma_{30} D_{30} + \gamma_{31} D_{31} + \gamma_{32} D_{32} + \gamma_{33} D_{33} + \gamma_{34} D_{34} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.8)
 \end{aligned}$$

dimana :

P = tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah

Y = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah

U = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah

E = angka partisipasi kasar SMA kabupaten/kota di Jawa Tengah

H = angka harapan hidup kabupaten/kota di Jawa Tengah

D₁ = *dummy* Kabupaten Cilacap

D₂ = *dummy* Kabupaten Banyumas

D₃ = *dummy* Kabupaten Purbalingga

D₄ = *dummy* Kabupaten Banjarnegara

D₅ = *dummy* Kabupaten Kebumen

D₆ = *dummy* Kabupaten Purworejo

D₇ = *dummy* Kabupaten Wonosobo

D₈ = *dummy* Kabupaten Magelang

D₉ = *dummy* Kabupaten Boyolali

D₁₀ = *dummy* Kabupaten Klaten

D₁₁ = *dummy* Kabupaten Sukoharjo

D₁₂ = *dummy* Kabupaten Wonogiri

$D_{13} = \text{dummy Kabupaten Karanganyar}$

$D_{14} = \text{dummy Kabupaten Sragen}$

$D_{15} = \text{dummy Kabupaten Grobogan}$

$D_{16} = \text{dummy Kabupaten Blora}$

$D_{17} = \text{dummy Kabupaten Rembang}$

$D_{18} = \text{dummy Kabupaten Pati}$

$D_{19} = \text{dummy Kabupaten Kudus}$

$D_{20} = \text{dummy Kabupaten Jepara}$

$D_{21} = \text{dummy Kabupaten Demak}$

$D_{22} = \text{dummy Kabupaten Semarang}$

$D_{23} = \text{dummy Kabupaten Temanggung}$

$D_{24} = \text{dummy Kabupaten Kendal}$

$D_{25} = \text{dummy Kabupaten Batang}$

$D_{26} = \text{dummy Kabupaten Pekalongan}$

$D_{27} = \text{dummy Kabupaten Pemasang}$

$D_{28} = \text{dummy Kabupaten Tegal}$

$D_{29} = \text{dummy Kabupaten Brebes}$

$D_{30} = \text{dummy Kota Magelang}$

$D_{31} = \text{dummy Kota Surakarta}$

$D_{32} = \text{dummy Kota Salatiga}$

$D_{33} = \text{dummy Kota Pekalongan}$

$D_{34} = \text{dummy Kota Tegal}$

$\alpha_0 = \text{intersep}$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien regresi variabel bebas

$\gamma_1 - \gamma_{34}$ = koefisien *dummy* wilayah

μ_{it} = komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i

$i = 1, 2, 3, \dots, 34$ (data *cross section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)

$t = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ (data *time series*, tahun 2004-2009)

Model persamaan 3.8 tersebut akan diregres dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

3.5 Hausman Test

Untuk menentukan secara tepat spesifikasi model yang akan digunakan apakah model *fixed effect* atau *random effect* maka dilakukan uji Hausman untuk menguji model yang paling baik yang akan digunakan dalam estimasi. Uji Hausman akan memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-Square Statistics* sehingga keputusan pemilihan model dapat ditentukan secara benar. Penolakan terhadap statistik Hausman tersebut berarti penolakan terhadap *fixed effect model* atau *dummy variable model*, sehingga semakin besar nilai statistik Hausman tersebut semakin mengarah pada penerimaan dugaan *error component model* (Baltagi, 2003).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual. Dibandingkan dengan metode lain, *Ordinary Least Squares* merupakan

metode sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan regresi linear terhadap sebuah model. Sebagai estimator, *Ordinary Least Squares* merupakan metode regresi dengan keunggulan sebagai estimator linear terbaik yang tidak bias atau biasa dikenal dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga hasil perhitungan *Ordinary Least Squares* dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Namun, untuk menjadi sebuah estimator yang baik dan tidak bias, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi.

Gujarati (2003) menyebutkan bahwa kesepuluh asumsi yang harus dipenuhi. *Pertama*, model persamaan berupa linear. *Kedua*, nilai variabel independen tetap meskipun dalam pengambilan sampel yang berulang. *Ketiga*, nilai rata-rata penyimpangan sama dengan nol. *Keempat*, *homocedasticity*. *Kelima*, tidak ada autokorelasi antara variabel. *Keenam*, nilai *covariance* sama dengan nol. *Ketujuh*, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi. *Kedelapan*, nilai variabel independen yang bervariasi. *Kesembilan*, model regresi harus memiliki bentuk yang jelas. *Kesepuluh*, adalah tidak adanya *multicollinearity* antar variabel independen. Terpenuhinya kesepuluh asumsi di atas menjadikan hasil regresi memiliki derajat kepercayaan yang tinggi.

3.6.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2002). Penelitian ini akan menggunakan

metode J-B test (uji *Jarque-Berra*) yang dilakukan dengan menghitung *skweness* dan *kurtosis*, apabila J-B hitung lebih kecil daripada nilai χ^2 (*Chi Square*) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal. Model untuk mengetahui deteksi normalitas adalah:

$$J - B_{hitung} = \left[\frac{S^2}{6} + \left(\frac{k-3}{24} \right)^2 \right] \dots\dots\dots 3.9$$

dimana:

S = Skewness statistik

K = Kurtosis

Jika nilai J - B_{hitung} lebih besar dari nilai J - B_{tabel}, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual Ut terdistribusi normal ditolak, dan sebaliknya.

3.6.2 Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila nilai R² yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya multikolinearitas (Imam Ghozali, 2005)

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model adalah sebagai berikut:

- 1) Mengestimasi model awal dalam persamaan sehingga mendapat nilai R^2 .
Jika nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, namun secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat multikolinearitas.
- 2) Melakukan regresi parsial. Menggunakan *auxiliary regression* pada masing-masing variabel independen, kemudian membandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model regresi parsial. Jika nilai R^2 dalam regresi parsial lebih tinggi maka terdapat multikolinearitas.

3.6.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana komponen *error* pada periode/observasi tertentu berkorelasi dengan komponen *error* pada periode/observasi lain yang berurutan. Dengan kata lain, komponen *error* tidak *random* (Gujarati, 2003).

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji *Lagrange Multiplier* (uji LM). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu u_t dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde p sebagai berikut:

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + \dots + \rho_p u_{t-p} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.4)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual jika $(n-p) \cdot R^2$ atau χ^2 hitung lebih besar dari χ^2

tabel, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ditolak (Firmansyah, 2006).

3.6.4 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi untuk memenuhi homoskedastisitas, yaitu komponen *error* sama untuk semua pengamatan. Menurut Gujarati (2003) bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data *cross section* dibandingkan dengan data *time series*.

Heteroskedastisitas muncul apabila *error* atau *residual model* yang diamati tidak memiliki variasi yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien. Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji Park pada prinsipnya meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. Jika t-statistik lebih besar daripada t-tabel dan signifikan terhadap $\alpha = 5$ persen, maka terdapat heteroskedastisitas. Namun, jika t-statistik lebih kecil daripada t-tabel dan tidak signifikan terhadap $\alpha = 5$ persen, maka tidak ada heteroskedastisitas.

3.7 Uji Signifikansi

Uji signifikansi terdiri dari (1) Uji *Goodness of Fit*, (2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F), dan (3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).

3.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (uji *goodness of fit*). Koefisien ini nilainya antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Semakin besar nilai koefisien tersebut maka variabel-variabel independen lebih mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi mengukur variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Bila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R^2 mendekati angka 1, maka variabel independen makin mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh model tersebut dapat dibenarkan (Gujarati, 2003).

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

- 1) Sebagai ukuran ketepatan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Apabila nilai R^2 semakin besar maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Sebaliknya, apabila semakin kecil nilai R^2 maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
- 2) Untuk mengukur proporsi atau presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y.

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara:

- 1) Menentukan hipotesis yang akan diuji (H_0 dan H_a).
- 2) Menentukan *level of significance* (α) tertentu.
- 3) Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan F-hitung.
- 4) Menarik kesimpulan.

Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas. Nilai F-hitung dicari dengan cara sebagai berikut:

$$F_{\text{-hit}} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)} \dots\dots\dots 3.10$$

Dimana:

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah observasi

3.7.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Imam Ghozali (2005), uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Bila jumlah *degree of freedom (df)* adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai t statistik dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai t statistik hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

$H_1 : \alpha_1 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel laju pertumbuhan PDRB secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_2 : \alpha_2 > 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel tingkat pengangguran secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_3 : \alpha_3 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel pendidikan secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_4 : \alpha_4 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel kesehatan secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_5: \gamma_1, \dots, \gamma_{34} > 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan positif pada *dummy* variabel wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam pembahasan ini, akan mendeskripsikan kondisi makro ekonomi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang meliputi masalah tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, pendidikan, dan kesehatan.

4.1.1 Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Masyarakat digolongkan ke dalam penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Berikut ini adalah data tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.